



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

“Sumatera Selatan Sejahtera, unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 serta dasar operasionalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 maka diharapkan kepada seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Kehutanan dapat melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagaimana telah dicanangkan dalam visi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2025

**Pih. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**SUGILO HARTONO, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197212081999031003**

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	41
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
Bab V. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	16
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	23
Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan	27
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan	38
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan	43

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, sehingga dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program-program strategis perangkat daerah pada tahun pertama yang termuat dalam Dokumen RKPD. Selain berpedoman pada RKPD, Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah tidak hanya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, Renja perangkat daerah juga harus memperhatikan Renja kementerian/lembaga dan Renja Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan untuk periode satu tahun dalam rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan dalam dokumen Renja Provinsi atau Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar adanya penyelarasan program dan kegiatan strategis perangkat daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA

Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk periode satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Framework Convention On Climate Change*;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Men-LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 19/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang

- Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
 36. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;
 37. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
 38. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.84/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan);
 39. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;
 40. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 317);
 41. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 15/Menhut II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi;
 42. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 38/Menhut II/2009 tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak;

43. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
44. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS);
45. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.46/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;
46. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
47. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.19/ Menhut II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan;
48. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 20/Menhut II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/ Kota;
49. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut II/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat;
50. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia P.46/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
51. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri;
52. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
53. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan;

54. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
55. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
56. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;
57. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunann Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
58. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
59. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
60. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
61. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
62. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
63. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
64. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
65. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

66. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
67. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
68. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial;
69. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
70. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Darah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
71. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/DISHUT/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar;
72. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 183 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
73. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 185 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolak ukur pelaksanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun yaitu tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 kedalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan program dan kegiatan.

Bab. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab. IV. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebanyak 5 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dengan realisasi total belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 54.497.856.540,00 atau 93,15 %. Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.99.852.706,- atau 99,85 %.
 - 1.2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD. Pagu anggaran Rp.126.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 125.774.402,- atau 99,82 %.
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pagu anggaran Rp. 45.638.736.364,- dengan realisasi keuangan Rp.43.454.974.404,- atau 95,22 %.
 - 2.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Pagu Anggaran Rp. 223.280.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 223.280.000,- atau 100 %.
 - 2.3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Pagu anggaran Rp. 69.545.200,- dengan realisasi keuangan Rp 68.689.323,- atau 98,77 %.

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 3.1. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
Pagu anggaran Rp.42.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 41.910.700,- atau 99,79 %.
4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4.1. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Pagu Anggaran Rp.32.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 31.793.700,- atau 99,36 %.
 - 4.2. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu Anggaran Rp.12.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0 %
5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Pagu anggaran Rp.39.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.762.339,- atau 99,39 %.
 - 5.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Pagu anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.800.837,- atau 99,60 %.
 - 5.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Pagu anggaran Rp.140.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 139.585.287,- atau 99,70 %.
 - 5.5. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pagu anggaran Rp.52.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 45.461.307,- atau 87,43 %.
 - 5.6. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pagu anggaran Rp.12.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.5.940.000,- atau 99 %.
 - 5.7. Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu. Pagu anggaran Rp.85.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 81.830.000,- atau 96,27 %.

- 5.8. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pagu anggaran Rp.940.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 939.370.239,- atau 98,67 %.
6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pagu anggaran Rp.25.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.25.000.000,- atau 100 %.
7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah.
 - 7.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pagu anggaran Rp.15.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 11.642.900,- atau 77,62 %.
 - 7.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pagu anggaran Rp. 645.732.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 509.934.486,- atau 78,97%.
 - 7.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu anggaran Rp. 3.419.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.419.300.000,- atau 99,80%.
8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 8.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pagu anggaran Rp.567.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 514.184.438,- atau 90,69%
 - 8.2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran Rp.93.271.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 83.245.000,-atau 89,25%

II. PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN.

1. Kegiatan Penelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - 1.1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan

Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan. Pagu anggaran Rp.43.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 41.940.193,- atau 97,54 %.

2. Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

2.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi. Pagu anggaran Rp.94.950.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 94.192.064,- atau 99,20%.

2.2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi. Pagu anggaran Rp.90.025.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 89.911.213,- atau 99,87%.

3. Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.

3.1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL. Pagu anggaran Rp.265.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp.182.019.303,- atau 68,63%.

3.2. Sub Kegiatan : Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara. Pagu anggaran Rp. 1.753.711.300,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.380.241.511,- atau 78,70%.

3.3. Sub Kegiatan : Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan. Pagu anggaran Rp.539.736.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 44.869.550,- atau 8,31%.

3.4. Sub Kegiatan : Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pagu anggaran Rp.399.667.000,- dengan realisasi keuangan Rp.0,- atau 0%.

3.5. Sub Kegiatan : Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pagu anggaran Rp. 1.171.185.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 972.513.897,- atau 83,04%.

4. Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

4.1. Sub Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan. Pagu anggaran Rp.100.411.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 100.030.265,- atau 99,62%.

4.2. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pagu anggaran Rp. 1.106.414.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.100.014.005,- atau 99,42 %.

5. Kegiatan : Perbenihan Tanaman Hutan.

5.1. Sub Kegiatan : Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar. Pagu anggaran Rp.63.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 54.702.589,- atau 85,74%.

III. PROGRAM : KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

1. Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

1.1. Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi. Pagu anggaran Rp.71.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 70.212.528,- atau 98,20%.

IV. PROGRAM : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN.

1. Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

1.1. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan. Pagu anggaran Rp.30.547.000,- dengan realisasi keuangan Rp.30.478.441,- atau 99,78%.

- 1.2. Sub Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan. Pagu anggaran Rp.296.134.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 279.249.148,- atau 94,30%.
- 1.3. Sub Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.109.048.188,- atau 99,13%.

V. PROGRAM : DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS).

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - 1.1. Sub Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.99.524.626,- atau 99,52%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					Urusan Pemerintahan Pilihan									
3	28				Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan									
3	28	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kehutanan kepada Stakeholder								
3	28	03	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/ berkembang								
3	28	03	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24 dokumen	10 Dokumen	2 dokumen	20%	2 Dokumen	28 dokumen	100%
3	28	03	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 laporan	48 Laporan	25 kali	20 laporan	80%	11 laporan	79 laporan	100%
3	28	03	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah								
3	28	03	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 orang	310 orang	12 bulan (310 orang)	290 orang	93%	310 orang	910 orang	93,5%
3	28	03	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	0	3 dokumen	0%	2 Dokumen	8 dokumen	100%
3	28	03	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	54 laporan	14 kali (14 laporan)	20 laporan	100%	12 Laporan	86 laporan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah								
3	28	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	100%
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah	0	8 kali	0	0	0%	0	0	0%
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuham Layanan Kinerja Perangkat Daerah								
3	28	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 Dokumen	2 dokumen	16%
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	3 orang	10 orang	0	0%	0	0	0%
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah								
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 paket	1 Paket	1 paket	100%	1 Paket	5 paket	100%
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket	3 paket	1 Paket	3 paket	100%	0	6 paket	0%
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	31 Jenis (3 paket)	1 Paket	1 paket	100%	1 Paket	5 paket	100%
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	1 Paket	1 paket	100%	1 Paket	5 paket	100%
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 paket	1 Paket	1 paket	100%	1 Paket	5 paket	100%
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6 Jenis (4 Dokumen)	2 Dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	8 dokumen	100%
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36 laporan	12 Laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	60 laporan	100%
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	560 laporan	250 laporan	400 laporan	100%	250 laporan	1310 laporan	100%
3	28	01	1.06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	8 dokumen	4 jenis (4 dokumen)	1 dokumen	100%	0	9 dokumen	0%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	03	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	28	03	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3 Unit	2 Unit	2 unit	100%	1 unit	6 unit	100%
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah								
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	50 laporan	100%
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	53 Rekening (36 laporan)	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	50 laporan	100%
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	35 orang (12 laporan)	12 laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	100%
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah								
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 unit	4 unit	2 Unit	25 unit	100%	25 unit	54 unit	100%
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	110 Unit	60 Unit	90 unit	100%	50 unit	250 unit	100%
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4 Unit	3 unit	0	0%	0	4 Unit	100%
3	28	03			Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Hutan sesuai dengan Dokumen Perencanaan tercapai								
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan (Identifikasi Permasalahan dalam Kawasan Hutan)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di Kawasan Hutan	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	100%	1 Dokumen	7 dokumen	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	2 Dokumen	7 dokumen	100%
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi (Monev Peredaran Hasil Hutan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	2 Dokumen	6 dokumen	100%
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Peningkatan Sarana Prasarana Jasa Lingkungan	0	1 lokasi	14 lokasi	0	100%	0	0	0%
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi								
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 dokumen	0%
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	1219,5 Ha	10 Ha	24,434 ha	100%	40 Ha	42,98 ha	100%
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pembinaan Kegiatan Konservasi Tanah dan Air serta Vegetatif	0	0	0	0	100%	17 unit	0	0%
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi rehabilitasi Hutan dan lahan	Luas area penerapan pengembangan teknologi RHL	0	0	0	0	0	180 unit	180 unit	0%
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	8 laporan	0	0	12 laporan	0	12 laporan	24 laporan	100%
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan								
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	200 Ha	1050 ha	300 Ha	280 ha	100%	300 Ha	1630 ha	100%
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	15 laporan	111 laporan	15 laporan	15 laporan	100%	15 laporan	141 laporan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi								
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	0	1 Unit	0	0	100%	0	1 Unit	0%
3	28	03	1.09		Perbenihan tanaman Hutan									
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit dan Perizinan	0	0	0	0	0	2 unit	2 unit	0%
3	28	04			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya wilayah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk menjaga kelestarian								
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan								
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	0 orang (2 kelompok)	17 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100%	40 orang	2 kelompok	100%
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0	4525920,57 Ha	1.511.649,29 ha	0	100%	0	0	0%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	28	051			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluh Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	05	1,01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial								
3	28	05	1,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 orang	83 orang	44 orang	54 orang	100%	20 orang	157 orang	100%
3	28	05	1,01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 ha	10214 ha; 3 usulan	4500 ha	4423 ha	100%	5000 ha	19637 ha	100%
3	28	05	1,01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	70 kelompok	132 KTH	14 KTH	118 KTH	100%	42 kelompok	292 KTH	100%
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi								
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS	1 dokumen (1 lokasi)	4 Kali (19 lokasi)	6 lokasi	9 lokasi	100%	1 dokumen	29 lokasi	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pelayanan Dinas Kehutanan tahun 2024 terletak pada capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan terhadap 7 Indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya dengan target Rp.73.795.118.040,-.
2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu dengan target 36 lokasi.
3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla dengan target 10,51%.
4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman dengan target 10 ha.
5. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi dengan target 0,14%.
6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan dengan target 140 kelompok.
7. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan disajikan pada Tabel T-C.30. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rp)	-	-	-	73.795.118.040	77.484.874.860	81.359.117.148	-	90.230.748.857,1 1	77.484.874.860	81.359.117.148	-
2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	-	-	-	36	61	82	-	171	61	82	-
3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	-	-	-	10,51	12,19	15,76	-	36,75	12,19	15,76	-
4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	-	-	-	10	10	20	-	130,08	10	20	-
5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	-	-	-	0,14	0,14	0,14	-	0,22	0,14	0,14	-
6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	-	-	-	140	175	200	-	165	175	200	-
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	-	100	100	100	-	95,45	100	100	-
8	Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan (Hektar)	-	-	12.350	-	-	-	21.593	-	-	-	-
9	Produksi kayu sub sektor kehutanan (M ³)	-	-	6,000.000	-	-	-	11.203.220,45	-	-	-	-
10	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Milyar Rupiah)	-	-	50.000.000.000	-	-	-	129.069.761.521	-	-	-	-
11	Peta Tematik yang KSP (Tematik)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan (Hotspot)	-	-	389	-	-	-	-3772	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Penurunan luas kebakaran hutan (Hektar)	-	-	5984,6	-	-	-	-1.546,79	-	-	-	-
14	Jumlah kasus yang tertangani (Kasus)	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-
15	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (Rasio)	-	-	0,44	-	-	-	0,465	-	-	-	-
16	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	-	0,120	0,17	-	-	-	0,27	-	-	-	-
17	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	-	0,270	0,17	-	-	-	0,05	-	-	-	-
18	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	-	100	5	-	-	-	83,33	-	-	-	-
19	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengendalian terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
2. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan hutan.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan hutan, mangrove dalam kawasan hutan dan kawasan bernilai ekosistem tinggi.
4. Kurangnya tutupan vegetasi dan pengelolaan DAS.
5. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kelompok perhutanan sosial.

Dampak yang terjadi akibat permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat adalah tidak tercapainya secara optimal tujuan pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan.

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pelayanan bidang kehutanan, antara lain :

1. Kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan yang rawan dengan kebakaran, perambahan dan konflik dengan masyarakat sekitar hutan.
2. Potensi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang belum dikembangkan secara optimal.
3. Penerimaan negara sub sektor kehutanan yang belum diatur dengan Regulasi Daerah Sektor Kehutanan.
4. Kelembagaan KPH yang belum optimal dalam pengelolaan hutan.

Peluang (*opportunities*) yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kehutanan yaitu pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi di bidang kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas bidang kehutanan adalah meningkatkan perlindungan terhadap kawasan hutan, mangrove dalam kawasan hutan dan kawasan bernilai ekosistem tinggi, memberikan kepastian penegakan hukum bidang sumberdaya alam di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, meningkatkan akses pemanfaatan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan melalui perhutanan sosial, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait perlindungan hutan, meningkatkan kerjasama dengan pemegang izin PBPH dan meningkatkan kualitas tutupan lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan DAS.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Rancangan awal penyusunan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Pada Tabel T-C. 31 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEHUTANAN				57,700,890.978	KEHUTANAN				64,300,891.378	
I	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rp. 77.484.874.860; 61 lokasi; 12,91%; 10 Ha; 0,14%	1,920,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rp. 77.484.874.860; 61 lokasi; 12,91%; 10 Ha; 0,14%	8,260,000	
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	75,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	6,075,000	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	75,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	6,075,000	
1.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Prov. Sumsel	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Prov. Sumsel	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	0 Unit	-	
1.3	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Prov. Sumsel	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	-	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Prov. Sumsel	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	-	
1.4	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	0 Dokumen	-	

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah Pembayaran PNBp sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874 .860	280,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah Pembayaran PNBp sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874 .860	280,000	
2.1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	130,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	130,000	
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	150,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	150,000	
3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	235,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	575,000	
3.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RThRL	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RThRL	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RThRL	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RThRL	0 Dokumen	-	
3.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	-	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	-	
3.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	160,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	500,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	Luas Area Penerapan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Ha	-	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	Luas Area Penerapan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Ha	-	
3.5	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	75,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	75,000	
3.6	Pembangunan Sumur resapan	Prov. Sumsel	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	0 Unit	-	Pembangunan Sumur resapan	Prov. Sumsel	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	0 Unit	-	
4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	61 lokasi; 12,19%	1,330,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	61 lokasi; 12,19%	1,330,000	
4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0 Laporan	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0 Laporan	-	
4.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	15 Laporan	1,130,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	15 Laporan	1,130,000	
4.3	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Prov. Sumsel	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	200 Ha	200,000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Prov. Sumsel	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	200 Ha	200,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Perbenihan Tanaman Hutan		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0.14%	-	Perbenihan Tanaman Hutan		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0.14%	-	
5.1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Prov. Sumsel	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	0 Unit	-	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Prov. Sumsel	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	0 Unit	-	
II	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	100,000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	100,000	
1	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	100,000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	100,000	
1.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	2 kelompok	100,000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	2 kelompok	100,000	
1.2	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0 Ha	-	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0 Ha	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	175 kelompok	721,000.0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	175 kelompok	821,000.4	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	175 kelompok	721,000.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	175 kelompok	821,000.4	
1.1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	70 KTH	471,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	70 KTH	571,000	
1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Prov. Sumsel	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	70,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Prov. Sumsel	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	70,000	
1.3	Penyiapan Perhutanan Sosial	Prov. Sumsel	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	180,000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Prov. Sumsel	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	180,000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	0.14%	50,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	0.14%	50,000	
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	50,000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	50,000	
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0 Orang	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0 Orang	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0 Lembaga	-	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0 Lembaga	-	
1.3	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Prov. Sumsel	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50,000	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Prov. Sumsel	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50,000	
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	54,909,890.978	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	55,069,890.978	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	275,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	275,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	175,000	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	47,603,336.7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	47,603,336.7	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 orang	47,163,336.7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 orang	47,163,336.7	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	340,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	340,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 Laporan	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 Laporan	100,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000	
3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	120,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	120,000	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50,000	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	70,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	70,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,407,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,567,000	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000	
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	12,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	12,000	
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	900,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	900,000	
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	160,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	35,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	35,000	
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35,000	
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	4,439,554.278	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	4,439,554.278	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	584,634.278	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	584,634.278	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	-	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,834,920	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,834,920	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	980,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	980,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	680,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	680,000	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	150,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	150,000	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishut / UPTD KPH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishut / UPTD KPH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan tahun 2025 pada Dinas Kehutanan Provisinsi Sumatera Selatan, dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan-kegiatan tahun 2025 yang mendukung kebijakan prioritas Gubernur Sumatera Selatan dan atau kebijakan nasional serta berdampak langsung bagi masyarakat, yang meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan, penurunan kemiskinan, penurunan kemiskinan ekstrem dan pelayanan publik.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang mendukung kebijakan prioritas Gubernur Sumatera Selatan dan atau kebijakan nasional dan sesuai dengan permasalahan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut.

Tabel T-C. 32.
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
 Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
I	Program : PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14 UPTD KPH	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan		
1	Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	14 UPTD KPH	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla		
1.1.	Sub Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	14UPTD KPH	Luas kawasan hutan yang dilakukan patroli pengamanan hutan	200 Ha	Mendukung Kebijakan Prioritas Gubernur Sumatera Selatan
1.2.	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran Hutan dan Lahan	14 UPTD KPH	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	15 laporan	Mendukung Kebijakan Prioritas Gubernur Sumatera Selatan
2	Kegiatan: Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	14 UPTD KPH	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		
2.1	Sub Kegiatan: Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	14 UPTD KPH	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Mendukung Kebijakan Prioritas Gubernur Sumatera Selatan
II	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis dan UPTD KPH Wil. III Palembang-Banyuasin	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.		
1	Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis dan UPTD KPH Wil. III Palembang-Banyuasin	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu		
1.1	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis dan UPTD KPH Wil. III Palembang-Banyuasin	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	2 kelompok	Mendukung Kebijakan Prioritas Gubernur Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	14 UPTD KPH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan		
1	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	14 UPTD KPH	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan		
1.1	Sub Kegiatan: Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	14 UPTD KPH	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	70 KTH	Mendukung Kebijakan Prioritas Gubernur Sumatera Selatan
1.2	Sub Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	14 UPTD KPH	Luas kawasan hutan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	Mendukung Kebijakan Prioritas Gubernur Sumatera Selatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2025 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD dan Renja PD tahun 2025, sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bersesuaian dengan prioritas pembangunan nasional Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan melaksanakan program pengelolaan hutan melalui Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama

Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dan bersesuaian dengan prioritas Pembangunan nasional Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan melaksanakan Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan yaitu :

“Pengelolaan Hutan Secara Lestari”.

Dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan yaitu :

1. Meningkatkan Produktivitas Kawasan Hutan.
2. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.
4. Meningkatkan Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial.
5. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2025 mengacu pada pencapaian visi Pj. Gubernur yang termuat dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai melalui program dan kegiatan tertentu. Program dan kegiatan yang dirumuskan disesuaikan dengan mempertimbangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2024 terdapat 7 indikator kinerja dengan realisasi mencapai target kinerja.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 (tahun rencana) telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 sebanyak 5 program, 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang/Sekretariat

Dinas dan 14 UPTD KPH dengan lokasi kegiatan yang tersebar di dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan. Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 64.300.891.378,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.

Perumusan program dan kegiatan mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2026 (tahun sesudah tahun rencana) dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN				64,300,891,378				65,534,455,033
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN								
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan		Rp. 77.484.874.860; 61 lokasi; 12,91%; 10 Ha; 0,14%	8,260,000,000		-	Rp.81.359.117.148;82 lokasi; 15,76%; 20 Ha; 0,14%	3,849,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya		Rp.77.484.874.860	6,075,000,000		-	Rp.81.359.117.148	776,000,000
3	28	3	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Prov. Sumsel	1 Dokumen	6,075,000,000	PAD	-	1 Dokumen	150,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	3	1.01	xxx	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-	0 Unit	-	-	-	140 Unit	126,000,000
3	28	3	1.01	xxx	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai kewajibannya	-	Rp.77.484.874.860	-	-	-	Rp.81.359.117.148	-
3	28	3	1.01	xxx	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-	0 Dokumen	-	-	-	14 Dokumen	500,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai kewajibannya		Rp.77.484.874.860	280,000,000		-	Rp.81.359.117.148	350,000,000
3	28	3	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Prov. Sumsel	2 Dokumen	130,000,000	PAD	-	2 Dokumen	150,000,000
3	28	3	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	2 Dokumen	150,000,000	PAD	-	2 Dokumen	200,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		10 Ha; 0,14%	575,000,000		-	20 Ha; 0,14%	948,000,000
3	28	3	1.04	xxx	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RTnRL	Prov. Sumsel	0 Dokumen	-	DBH Sawit	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	3	1.04	xxx	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	0 Ha	-	DBH Sawit	-	20 Ha	300,000,000
3	28	3	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	5 Ha	500,000,000	PAD	-	10 Ha	240,000,000
3	28	3	1.04	xxx	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	0 Ha	-	DBH Sawit	-	5 Ha	208,000,000
3	28	3	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Prov. Sumsel	8 Laporan	75,000,000	PAD	-	12 Laporan	150,000,000
3	28	3	1.04	xxx	Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun		0 Unit	-		-	2 Unit	50,000,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla		61 lokasi; 12,19%	1,330,000,000		-	82 lokasi; 15,76%	1,775,000,000
3	28	3	1.05	xxx	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	0 Laporan	-	-	-	15 Laporan	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	3	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Prov. Sumsel	15 Laporan	1,130,000,000	PAD	-	15 Laporan	1,375,000,000
3	28	3	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Prov. Sumsel	200 Ha	200,000,000	PAD	-	300 Ha	300,000,000
3	28	3	xxx		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		0.14%	-		-	0%	-
3	28	3	xxx	xxx	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Prov. Sumsel	0 Unit	-	DBH Sawit	-	0 Unit	-
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.		2 lokasi	100,000,000		-	3 lokasi	250,000,000
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.		2 lokasi	100,000,000		-	3 lokasi	250,000,000
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Prov. Sumsel	2 kelompok	100,000,000	PAD	-	3 kelompok	150,000,000
3	28	04	1.03	xxx	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	-	0 Ha	-		-	200 Ha	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	04			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial		175 kelompok	821,000,400.0		-	200 kelompok	1,360,000,000.0
3	28	04	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan		175 kelompok	821,000,400		-	200 kelompok	1,360,000,000
3	28	04	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Prov. Sumsel	70 KTH	571,000,400	PAD	-	70 KTH	800,000,000
3	28	04	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Prov. Sumsel	20 Orang	70,000,000	PAD	-	40 Orang	160,000,000
3	28	04	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Prov. Sumsel	5000 Ha	180,000,000	PAD	-	5000 Ha	400,000,000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan		0.14%	50,000,000		-	0.14%	345,000,000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		10 Ha; 0,14%	50,000,000		-	20 Ha; 0,14%	345,000,000
3	28	06	1.01	xxx	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	0 Orang	-	-	-	50 Orang	75,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	06	1.01	xxx	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	0 Lembaga	-	-	-	2 Lembaga	150,000,000
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Prov. Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	PAD	-	1 Dokumen	120,000,000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100%	55,069,890,978	-	-	100%	59,730,455,033
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	275,000,000		-	100%	460,000,000
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	2 Dokumen	100,000,000	PAD	-	2 Dokumen	150,000,000
3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishut dan UPTD KPH	14 Laporan	175,000,000	PAD	-	14 Laporan	210,000,000
3	28	01	1.01	xxx	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	0 Laporan	-	PAD	-	8 Laporan	100,000,000
3	28	01	1.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	47,603,336,700.0		-	100%	49,593,172,055.0
3	28	01	1.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dishut dan UPTD KPH	339 orang	47,163,336,700.0	DAU dan PAD	-	310 orang	49,053,172,055

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.01	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishut dan UPTD KPH	3 dokumen	340,000,000	PAD	-	3 dokumen	340,000,000
3	28	01	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dishut dan UPTD KPH	8 Laporan	100,000,000	PAD	-	12 Laporan	200,000,000
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	50,000,000		-	100%	250,000,000
3	28	01	1.03	xxx	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	-	-	-	1 Laporan	75,000,000
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishut dan UPTD KPH	1 Dokumen	50,000,000	PAD	-	1 Dokumen	105,000,000
3	28	01	1.03	xxx	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	-		-	1 Laporan	70,000,000
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	120,000,000		-	100%	489,362,978
3	28	01	1.05	xxx	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	0 Unit	-	-	-	468 Unit	351,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	12 Dokumen	50,000,000	PAD	-	12 Dokumen	75,000,000
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dishut dan UPTD KPH	2 Orang	70,000,000	PAD	-	2 Orang	63,362,978
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,567,000,000		-	100%	2,279,000,000
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	1 Paket	60,000,000	PAD	-	1 Paket	120,000,000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	1 Paket	50,000,000	PAD	-	1 Paket	170,000,000
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	1 Paket	60,000,000	PAD	-	1 Paket	110,000,000
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	2 Paket	150,000,000	PAD	-	2 Paket	190,000,000
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Dishut dan UPTD KPH	1 Paket	75,000,000	PAD	-	1 Paket	133,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	2 jenis	12,000,000	PAD	-	2 jenis	12,000,000
3	28	01	1.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishut dan UPTD KPH	12 Laporan	100,000,000	PAD	-	12 Laporan	150,000,000
3	28	01	1.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishut dan UPTD KPH	150 Laporan	900,000,000	PAD	-	200 Laporan	1,200,000,000
3	28	01	1.06	0009	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dishut	0 Dokumen	-	PAD	-	380 Dokumen	94,000,000
3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dishut	0 Dokumen	160,000,000	PAD	-	1 Dokumen	100,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	35,000,000		-	100%	630,000,000
3	28	01	1.07	xxx	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	-	-	-	10 Unit	350,000,000
3	28	01	1.07	xxx	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	0 Unit	-	-	-	2 Unit	150,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	1 Unit	35,000,000	PAD	-	2 Unit	50,000,000
3	28	01	1.07	xxx	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit	-		-	62 Unit	80,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	4,439,554,278.000		-	100%	4,653,920,000.000
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishut dan UPTD KPH	12 laporan	20,000,000	PAD	-	12 laporan	30,000,000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	12 laporan	584,634,278.000	PAD	-	12 laporan	600,000,000
3	28	01	1.08	xxx	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0 laporan	-		-	12 laporan	189,000,000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dishut dan UPTD KPH	12 laporan	3,834,920,000	PAD	-	12 laporan	3,834,920,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	980,000,000		-	100%	1,375,000,000
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dishut dan UPTD KPH	22 Unit	680,000,000	PAD	-	38 Unit	730,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dishut dan UPTD KPH	50 Unit	150,000,000	PAD	-	65 Unit	195,000,000
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dishut / UPTD KPH	1 Unit	150,000,000	PAD	-	3 Unit	300,000,000
3	28	01	1.09	xxx	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0 Unit	-	-	-	2 Unit	150,000,000

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kehutanan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kehutanan, maka dalam menetapkan program dan kegiatan harus mendukung visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan mendukung Pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Selatan, maka disusun rencana kerja tahun 2025 yang berisikan 5 program, 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan indikatif ditargetkan sebesar Rp. Rp. 64.300.891.378,-. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 , sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - 6.1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan:
 - 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
 - 2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
 - 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
 - 3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dengan sub kegiatan:
 - 3.1. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

- 3.2. Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan
4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan sub kegiatan:
 - 4.1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - 4.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- III. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- IV. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluh Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan:
 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
 - 1.2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - 1.3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- V. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) dengan kegiatan:
 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rencana maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKD maupun IKU. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKD maupun IKU tahunan dalam renstra.

Untuk pelaksanaan rencana diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan rencana 2025.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan.
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala dan pendampingan teknis.

Palembang, Januari 2025

**Plh.KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SUSILO HARTONO, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197212081999031003